



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan peranan dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi ...

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, meliputi ketentuan pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan.
- KEDUA : Menetapkan perubahan susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021 sehingga susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan perubahan susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021 sehingga susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menjadi sebagai berikut :
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

Ketua ...

c. Ketua Pelaksana adalah :

1. Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas;
2. Sub Koordinator Hukum;
3. Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik;
dan
4. Sub Koordinator Program dan Data.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Sekretaris



Kasdanil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 4/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR
3/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1	2	3	4
1	Heldo Aura, S.Si, M.IP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pembina
2	Benny Aziz, S.E	Divisi SP3MSDM	Pembina
3	Donny Syahputra, S.HI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4	Drs. Yasrul, M.M	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5	Zulwida Rahmayeni, S.E, M.M	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
6	Ir. Kasdanil, S.H	Sekretaris KPU Kota Bukittinggi	Ketua
7	Beni Mustika, S.IP	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8	Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H	Sub Koordinator Hukum	Ketua Pelaksana
9	Benny Rinaldo, S.H	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
10	Mega Ardila, S.I. Kom, M.Si	Sub Koordinator Program dan Data	Ketua Pelaksana
11	Diana Sari Dewi Kosasi. S.Sos, M.Si	Fungsional Umum Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
12	Wini Gusnita, A.Md	Fungsional Umum Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Sekretaris



Kasdanil